

**PERAN LEMBAGA SOLIDARITAS PEREMPUAN DALAM
PERLINDUNGAN TEHADAP PEREMPUAN BURUH MIGRAN DI DESA
KEKERI KECEMATAN GUNUNG SARI
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Oleh

Resapriana
Nim: 1501050683

**PRORAGM STUDI TADRIS IPS EKONOMI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
2022**

**PERAN LEMBAGA SOLIDARITAS PEREMPUAN DALAM
PERLINDUNGAN TEHADAP PEREMPUAN BURUH MIGRAN DI DESA
KEKERI KECEMATAN GUNUNG SARI
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram Untuk
Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan**



Oleh

**Resapriana
Nim: 1501050683**

**PRORAGM STUDI TADRIS IPS EKONOMI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM**

2022



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh : Resapriana, NIM : 1501050683 dengan judul "Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Buruh Migran Di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal

20 Mei 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Pembimbing I,

Ahmad Khalakul Khairi, M.Ag
NIP. 197401262007011010

Pembimbing II,

M. Zamrud ahman, M.Pd
NIP. 198405162019031103

Mataram,

Hal : **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : Resapriana

NIM : 1501050683

Jurusan/Prodi : IPS Ekonomi

Judul : Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Buruh Migran Di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat disegerakan di-*munaqasyah*-kan.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,

Ahmad Khairul Khairi, M.Ag
NIP.107401462007011010

Pembimbing II,

Zainurrahman, M.Pd
NIP.198405162019031103

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Resapriana, NIM : 1501050683 dengan judul "Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Buruh Migran Di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat" telah dipertahankan di depan dewan penguji Program Studi Tadris IPS Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram pada tanggal

Dewan Penguji

Ahmad Khalakul Khairi, M.Ag
(Ketua Sidang/ Pemb. I)

M. Zainurrahman, M.Pd
(Sekretaris Sidang/
Pemb. II)

Sakdiah, M. Si
(Penguji I)

Muhammad Helmy Reza,
MM
(Penguji II)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



Dr. Iqmarim, M.HI
NIP. 1976123122005011006

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya : Dan jika kamu meragukan (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. ¹



¹ QS . Al-baqarah:(23). Muhammad Quraish Sihab, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Kementrian Agama Republik Indonesia/Tafsir Jalalain

PERSEMBAHAN

“saya persembahkan skripsi ini untuk ibu saya FATIMAH dan bapak saya MUSTAMIN, Kakak-kakak saya, Adik saya muliyati, Adik keduaku selvi aprilia dan sahabatku fitrianingsih sama sumiyati serta orang-orang yang menyayangi saya”



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Aamii.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Bapak Ahmad Khalkul Khairi, M,Ag. Sebagai pembimbing I sekaligus sebagai Ketua Program Studi Tadris IPS dan bapak M. Zainurrahman M,Pd. Sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motifasi, dan koreksi, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kessibukannya.
2. Ibu Dr. Nurrahmah, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberi motivasi dan bimbingan selama masa perkuliahan
3. Dr. Jumarim. M.HI. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah
4. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk menuntut menuntut tidak berlama-lama tanpa pernah selesai.
5. Sahabat-sahabat, teman-teman, keluarga besar, serta orang-orang yang menyayangi saya.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah SWT. segala urusan dilancarkan dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat untuk pembaca. Aamiin.

Mataram,

Penulis,

Resapriana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	27

1. Jenis Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian.....	28
3. Lokasi Penelitian	28
4. Sumber Data	28
5. Tehnik Pengumpulan Data	31
6. Tehnik Analisis Data	34
7. Pengecekan Keabsahan Data	36

BAB II PAPARAN DATA TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Profil Lembaga Solidaritas Perempuan (SP)	38
2. Solidaritas Perempuan (SP) Mataram	38
3. Visi-misi Lembaga Solidaritas Perempuan (SP)	40
4. Program Lembaga Solidaritas (SP) Perempuan	42
B. Hasil Temuan	43
1. Kondisi perempuan migran di desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari	43
2. Peran solidaritas perempuan dalam melindungi perempuan migran di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari.....	50

BAB III PEMBAHASAN

A. Kondisi Perempuan Buruh Migran di desa kekerri kecamatan gunung sari kabupaten Lombok Barat.....	58
B. Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Melindungi	

Perempuan Migran Di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari59

BAB IV PENUTUP

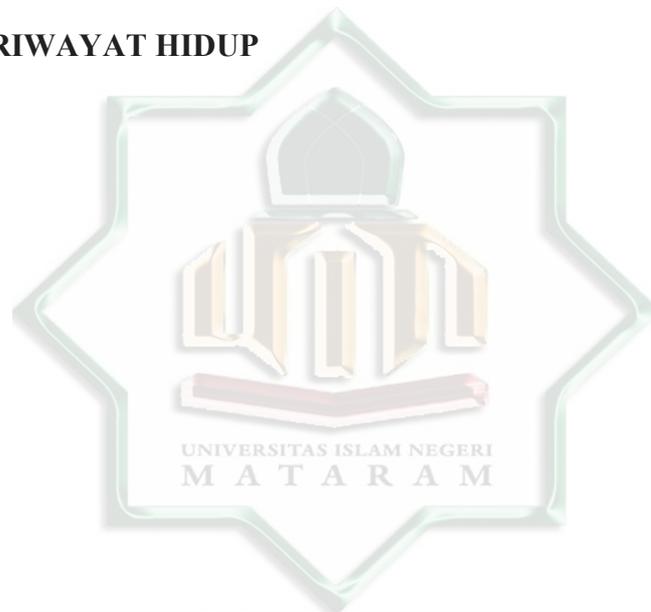
A. Kesimpulan.....63

B. Saran63

DAFTAR PUSTAKA.....65

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nama-Nama Pegawai Lembaga Solidaritas Perempuan41



Perpustakaan **UIN Mataram**

DAFTAR LAMPIRAN



Perpustakaan **UIN Mataram**



Perpustakaan UIN Mataram

PERAN LEMABAGA SOLIDARITAS PEREMPUAN DALAM PERLINDUNGAN TEHADAP PEREMPUAN BURUH MIGRAN DI DESA KEKERI KECEMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Oleh

Resapriana
Nim: 1501050683

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas “ Kondisi Buruh Migran dan Peran Lembaga Solidaritas Perempuan dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Buruh Migran “. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah “Kondisi buruh migran di desa Kekerri kecamatan Gunung Sari dan bagaimakah peran lembaga solidaritas perempuan dalam melindungi perempuan migran di desa Kekerri kecamatan Gunung Sari”. Teori yang dijadikan landasan pada penelitian ini adalah fungsionalisme struktur. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus instrumental, karena peneliti sangat ingin memahami atau menekankan pada pemahaman tentang suatu isu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa adapun kondisi buruh migran dan peran lembaga solidaritas perempuan dalam melindungi perempuan migran di desa kekeri kecamatan gunung sari, diantaranya pertama kondisi buruh migran, kondisi buruh migran saat ini sebagian besar mengalami kesulitan dalam segi ekonomi, sosial dan budaya, yaitu tidak berlakunya izin kerja karena diperbaharui, mereka harus bersembunyi dari rajia supaya tidak tertangkap dan kurangnya informasi ysng didapat sehingga perempuan buruh migran banyak yang tidak mendapat gaji. Dan adapun peran lembaga solidaritas perempuan dalam melindungi perempuan migran yaitu mendampingi buruh migran dalam keadaan apapun dan kemanapun saat proses penanganan kasus berlangsung terhadap keluarga korban buruh migran perempuan, memotivasi buruh migran perempuan dalam menghadapi masalahnya dan tidak hanya pada saat permasalahan berlangsung dan memanfaatkan media dan membina hubungan masyarakat, mengembangkan jaringan membagi pengetahuan dan pengalaman.

Kata kunci: **Peran, Lembaga Solidaritas, Kondisi.**



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diberbagai situasi perempuan kerap dimintai pandangan serta keputusannya atas kehidupannya. Penindasan seksual yang terjadi pada perempuan tidak hanya secara individual, tetapi juga dipengaruhi oleh stigma masyarakat messssslalui praktik-praktik diskriminatif hingga penindasan ekonomi struktural oleh Negara dari minimnya kebijakan perlindungan dana distribusi ekonomi yang tidak adil, termasuk hilangnya sumber produksi ekonomi perempuan. Fenomena migrasi di Indonesia lahir dari kemiskinan struktural, dimana masyarakat, terlebih perempuan kehilangan sumber-sumber kehidupan dan sumber mata pencaharian mereka sehingga harus mencari sumber kenghidupan keluar negeri sebagai sebuah strategi bertahan hidup. Dalam situasi pemiskinan, perempuan dan laki-laki memiliki dampak, namun dampak yang dirasakan perempuan sangatlah berbeda dan berlipat ganda. Hal ini diakibatkan oleh konstruksi gender maupun control dan penindasan seksualitas yang dialami perempuan.

Fenomena migrasi yang diawali dengan keterbatasan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber-sumber kehidupan. Hal di akibatkan oleh kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi global serta menempatkan perempuan dalam situasi kemiskinan. Selama ini perempuan kerap kali dijadikan solusi dari banyak persoalan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga. Seperti dijadikan objek tanggungan hutang, aset ekonomi untuk membantu keluarga mencari nafkah, perempuan

buruh migran kerap kali mengalami ketidakadilan dan penindasan berlapis yang terjadi di desa akibat kemiskinan maupun diseluruh tahap migrasi. Yaitu pra pemberangkatan, masa kerja hingga kepulangan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa, kemiskinan suatu Negara berkaitan erat dengan tingkat pengangguran di Negara tersebut. Berkaitan dengan hasil penelitian yang mengkaitkan antara pengangguran dan kemiskinan, maka munculah sebuah teori yang mengatakan bahwa “tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Dalam hal ini tingkat pengangguran mengalami kenaikan, jadi secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat.” Salah satu penyebab dari tingginya angka kemiskinan dalam suatu Negara adalah peluang dan kesempatan kerja yang sedikit di dalam Negara tersebut. Indonesia dengan jumlah penduduknya yang lebih dari 230 (Dua Ratus Tiga Puluh) juta jiwa dan termasuk dalam Negara yang memiliki jumlah pengangguran terbanyak. Minimnya kesempatan kerja dan persaingan pasar kerja yang begitu ketat di dalam negeri serta peluang memperoleh gaji yang tinggi di luar negeri, telah menyebabkan banyak dari warga Indonesia yang mencoba mencari peruntungan di luar negeri. Warga Negara Indonesia yang bekerja diluar negeri ini biasa dikenal dengan istilah TKI (Tenaga Kerja Indonesia).²

Solidaritas perempuan merupakan salah satu organisasi feminis yang didirikan pada 10 desember 1990. Dimana organisasi ini merupakan wahana untuk membangun gerakan perempuan yang bisa mewedahi berbagai upaya untuk menciptakan tatanan yang lebih adil dan demokratis bagi perempuan dan

² Syarifah Asmar, *Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan Dan Keluarganya*, (skripsi, FIDK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019), hlm. 1-2.

masyarakat secara umum. Sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan yang salah satu fokus isunya adalah buruh migran perempuan. Dalam memperjuangkan hak-hak buruh migran dan keluarganya, solidaritas perempuan juga memberikan pendampingan dalam kasus-kasus pelanggaran hak yang terjadi pada perempuan buruh migran.

Pemerintah Indonesia hanya memandang buruh migran Indonesia sebagai suatu individu. Keberadaannya hingga saat ini hanya dilihat sebagai seorang pekerja yang selama bekerja diluar negeri dianggap lepas dari keluarga mereka. Pada hakikatnya elemen keluarga merupakan suatu elemen yang penting bagi buruh migran tersebut. Akan tetapi keluarga tidak mendapat perhatian, tidak diperhitungkan kecuali surat izin keluarga dalam kegiatan keputusan penempatan buruh migran. Dengan mengabaikan hak buruh migran beserta keluarga misalnya hak atas informasi terhadap keluarga buruh migran. Setiap bentuk pembatasan atas dasar kepentingan apapun, harus dihindari. Sebab hal itu dapat merusak buruh migran itu sendiri, juga akan menghancurkan kehidupan keluarganya, dan masa depannya sendiri.

Perempuan buruh migran mengalami penindasan berlapis, ini diakibatkan oleh lemahnya kebijakan Negara dalam melindungi buruh migran. Tahun 2016 masih dihiasi oleh berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran hak yang terjadi pada buruh migran perempuan dan keluarganya. Kekerasan kriminalisasi, fisik dan psikis hingga *trafficking* dan menghilangkan nyawa sudah menjadi kasus-kasus yang hingga saat ini belum ditangani. Pengalaman lembaga solidaritas perempuan dalam menangani kasus menunjukkan bahwa,

satu perempuan buruh migran bisa mengalami lebih dari satu kekerasan dan pelanggaran hak. Diskriminasi berbasis gender, kelas sosial, kelas ekonomi, ras, maupun agama, serta berbagai kebijakan Negara telah menghasilkan penindasan berlapis terhadap perempuan buruh migran.

Diperlakukan secara manusiawi adalah hak dasar setiap manusia sebagaimana penghormatan terhadap martabat manusia ini juga menjadi perhatian serius para imam madzhab, seperti Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam kitab *At-Tasyri Al-Jana'i Fi Al-Islami* karya Abdul Qadir Audah (juz 1 halaman 95) dikatakan, "barang siapa yang menyekap orang lain, tidak memberi makan dan minum atau menempatkan ditempat yang dingin, kemudian meninggal akibat kelaparan, kehausan atau kedinginan, jika ia bermaksud membunuh maka hal itu adalah bagian dari pembunuhan sengaja yang pelakunya boleh di *qishas*". Demikian pula dengan calon buruh migran perempuan. Data kasus kekerasan terjadi pada tahun 2017, laporan yang masuk Lembaga Solidaritas Perempuan (SP) sebanyak 4 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) migran salah satunya adalah *trafficking*, kekerasan dan hilang kontak termasuk gaji yang tidak pernah di bayar oleh majikan terhadap PRT, sedangkan kasus yang ditangani oleh lembaga solidaritas perempuan pada tahun 2022 mulai dari awal Januari sampai sekarang itu terdapat 9 kasus *Trafficking*, kekerasan dan hilang kontak pada perempuan buruh migran yang bekerja di Turki, Saudi dan Malaysia dan itu cukup

mencengangkan membuat Lembaga Solidaritas Perempuan harus bekerja ekstra untuk menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan ini.³

Besarnya jumlah pekerja migran perempuan dengan tingkat pendidikan yang terbatas mengakibatkan kerentanan terhadap terjadinya praktik pelanggaran HAM. Ada beberapa praktik pelanggaran HAM yang kerap terjadi, misalnya trafficking, kekerasan terhadap PRT migran, hukuman mati, dan lain-lain. Selain itu, besarnya pengiriman pekerja migran, terutama perempuan ke beberapa negara pemasok tidak diimbangi dengan perlindungan yang ada. Dengan kata lain bisa disebut bahwa pengiriman pekerja migran perempuan masih dipandang sebagai komoditas untuk memenuhi permintaan dan bukan sebagai pekerja Indonesia di luar negara yang wajib dilindungi. Dalam upaya perlindungan perempuan migran, negara harus memahami dan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka agar tujuan perlindungan dapat terlaksana dengan baik, sehingga tercapai kesejahteraan bagi perempuan buruh migran.⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lembaga solidaritas perempuan (SP) di dapatkan bahwa kurangnya informasi yang di dapat oleh perempuan buruh migran sehingga banyak kasus yang di alami oleh perempuan buruh migran diantaranya, *trafficking*, gaji tidak di bayar, kekerasan terhadap perempuan buruh migran. Anggota lembaga solidaritas perempuan (SP) sebagai organisasi yang fokusnya pada buruh migran perempuan melakukan penguatan dan advokasi hak-hak buruh migran terutama perempuan. Solidaritas perempuan secara aktif mendorong kebijakan

³ *Ibid.* hlm.6

⁴ Hantoro Situmorang, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, CV BUDI UTAMA, 2021). Hlm. 1-2

perlindungan dalam memperjuangkan hak-hak buruh migran perempuan dan pendampingan pada kasus-kasus pelanggaran hak yang dialami oleh perempuan buruh migran.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Lembaga Solidaritas Perempuan dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Buruh Migran di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat tahun 2022.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi perempuan buruh migran di desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari ?
2. Bagaimana peran solidaritas perempuan dalam melindungi perempuan buruh smigran di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kondisi perempuan buruh migran di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari
 - b. Untuk mengetahui peran lembaga solidaritas perempuan dalam melindungi perempuan buruh migran di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari
2. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat dan dapat menjadi sarana masukan untuk pihak dinas Ketenaga Kerjaan, lebih khusus mengenai pentingnya pelayanan sosial bagi korban kekerasan

terhadap buruh migran yang berada di luar negeri dan dapat menangani permasalahan yang dihadapi dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan buruh migran.

a. Secara teoritis

Sebagai hasil suatu karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau rujukan dan pengetahuan terkait peran lembaga solidaritas perempuan dalam perlindungan terhadap perempuan buruh migran Di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi dan tambahan pengetahuan dalam peran lembaga solidaritas perempuan dalam perlindungan terhadap perempuan buruh migran.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu

- a. peran dan fungsi lembaga solidaritas
- b. situasi kondisi dan masalah-masalah buruh migran
- c. peran lembaga solidaritas dalam melindungi buruh migran

2. *Setting* Penelitian

Penelitian tentang “Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Buruh Migran Di Desa Kekeri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Peneliti mengambil lembaga tersebut sebagai tempat penelitian mencakup beberapa alasan, di antaranya :

- a. Banyak perempuan di desa kekери yang jadi TKW
- b. Bebrapa TKW menemui masalah dalam karirnya sebagai buruh migran
- c. Lembaga solidaritas perempuan yang dapat memberi solusi pada adanya masalah-masalah yang di hadapi migran di desa Kekeri

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah salah satu referensi yang diambil oleh peneliti untuk melihat hasil karya ilmiah peneliti terdahulu, yang mana dasar penelitiannya mengutip beberapa pendapat yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai pendukung peneliti. Tentunya dengan melihat hasil karya ilmiah yang memiliki pembahasan yang hampir sama.

Untuk pengembangan pengetahuan, peneliti terdahulu telah menelaah penelitian yang berkaitan dengan lembaga solidaritas perempuan migran, menelaah karya ilmiah terdahulu bagi peneliti juga sangat penting, yakni untuk memberi gambaran awal mengenai penelitian yang diteliti. Peneliti melakukan telaah pustaka pada hasil terdahulu, adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang:

- a. Karya ilmiah yang sebelumnya diteliti oleh Yulius Purwadi Hermawan Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul “Identifikasi Potensi Perempuan dalam Upaya Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia” dalam penelitian ini peneliti melakukan identifikasi potensi perempuan-perempuan yang menjadi pemangku kepentingan terkait isu migrasi tenaga kerja dalam upaya perlindungan buruh migran perempuan Indonesia yang bekerja disektor informal diluar negeri.⁵
- b. Selanjutnya skripsi oleh Hazza Shabira Delanda (2021) dengan judul karya ilmiah “Peran Media Komunikasi Solidaritas Perempuan Sumbawa Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Sumbawa”, dalam pembahasannya bahwa media baru seperti internet telah membuka ruang yang begitu luas bagi setiap orang untuk mencari maupun membagikan banyak informasi dan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat untuk memperoleh informasi termasuk masalah dalam bidang komunikasi dan informasi.⁶
- c. Selanjutnya skripsi oleh Dwi Sartika Suryani dengan judul karya ilmiah “peran solidaritas perempuan dalam pemberdayaan buruh migran di karawang” dalam pembahasannya, hasil penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sejumlah tokoh perempuan diakar

⁵ Yulius Purwadi Hermawan, “*Identifikasi Potensi Perempuan Dalam Upaya Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia*”, (Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, 2014), hlm. 3.

⁶ Hazza Shabira, “*Peran Media Komunikasi Solidaritas Perempuan Sumbawa Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Sumbawa*”, (Jurnal Of Communication Science, 2021),Hlm. 105.

rumpun yang di pandang memiliki pengaruh dalam upaya perlindungan BMP Indonesia. Penelitian ini masih sangat bisa dikembangkan dengan memerdalam pertanyaan penelitian dengan menanyakan pertanyaan lanjutan yang muncul dari analisa terhadap jawaban yang di dapatkan, menambah jumlah responded supaya mencakup kelompok aktor lain seperti BMP sukses dan aktor laki-laki, dan mempluar fokus penelitian supaya mencakup aspek-aspek lain dari upaya perlindungan seperti upaya-upaya yang lebih diarahkan pada BMP itu sendiri.⁷

Adapun beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu terletak pada objek pembahasannya, yaitu pada penelitian terlebih dahulu lebih fokus pada identifikasi potensi perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam melindungi buruh migran sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada peran lembaga solidaritas perempuan dalam perlindungan terhadap perempuan buruh migran.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran ialah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan pengertian peran dalam kamus modern adalah sesuatu yang menjadi kegiatan atau memegang pimpinan yang utama. Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran

⁷ Dwi Kartika Suryani, "peran solidaritas perempuan dalam pemberdayaan buruh migran di karawang", (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2020), lm. 9-10

dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis.⁸

Peran dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, sang pelaku peran baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peran menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur sosial. Konsep peran ini pada dasarnya berhubungan dan harus dibedakan dengan posisi sosial. Posisi merupakan elemen dari organisasi, letak dalam ruang sosial, kategori keanggotaan organisasi sedangkan peran adalah suatu aspek dari fisiologi organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi, dan proses.⁹

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau di jalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktifitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.¹⁰

Peran menurut *terminology* adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task orduty in undertaking*”. Artinya “ tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu

⁸ Suharso , Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Widia Karya, Semarang, 2011), hlm. 125

⁹ T. May Rudy, S.H., MIR., M.Se. “*studi strategis dalam transformasi system internasional pasca perang dingin*”, (bandung, 2002), hlm. 137.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasioanl, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹¹

Soejono Soekanto berpendapat bahwa peran adalah suatu perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat dan dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki suatu kedudukan dalam masyarakat, maka Ia melaksanakan suatu perannya dengan memperhatikan hak dan kewajibannya.¹²

Dari penjelasan di atas, terdapat gambaran bahwa peranan yang dimaksud merupakan kewajiban-kewajiban dan keharusan yang dilakukan seseorang maupun suatu organisasi atau lembaga karena kedudukannya di dalam status tertentu dalam suatu masyarakat di mana Ia berada.

Adapun beberapa jenis peran *role* menurut Bruce J. Cosen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Peranan yang nyata (*Anactec Role*), yaitu suatu cara yang benar-benar dilaksanakan seseorang atau kelompok dalam menjalankan suatu peranan tertentu.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribe Role*), yaitu suatu cara yang diharapkan masyarakat kepada kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflick*), yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki satu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

¹¹ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (*Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*), (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm 86

¹² Kustini, *opcit*, hlm. 7

- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*), adalah pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*), ialah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*), yakni seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, atau ikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*), ialah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada di sedang menjalankan perannya.¹³

Sama halnya dengan seorang ketua yang memiliki sebuah organisasi atau lembaga swadaya masyarakat sebagai tempat untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan sosial pada umumnya. Di sana ada harapan yang sangat besar sekali dari masyarakat dan mengingat pentingnya hal ini untuk membangun dan perubahan social bangsa Indonesia. Maka dari itu penulis mengambil peran lembaga solidaritas perempuan dalam perlindungan terhadap perempuan buruh migran yang akan dikembangkan dan mendapatkan suatu pembelajaran dari hasil penelitian yaitu mengetahui seberapa jauh peran lembaga tersebut.

2. Definisi Lembaga

Lembaga merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, berkerja sama secara organisasi, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Lembaga terdiri dari dua aspek, yakni aspek kelembagaan dan aspek

¹³ S Fahrizal, <http://repository.Radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada taggal 11 april 2022 pukul 11. 09 WIB

keorganisasian. Dalam aspek kelembagaan lebih menekankan pada tatanan nilai-nilai moral dan peretauran-peraturan yang berada dalam masyarakat. Sedangkan dalam sudut pandang organisasi lebih menekankan pada aspek struktur dan mekanismenya dalam mencapai tujuan.¹⁴

Istilah lembaga berasal dari kata *institution* yang menunjuk pada pengertian tentang sesuatu yang telah mapan (*established*). Dalam pengertian sosiologi, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu orang yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga pada mulanya terbentuk dari suatu kebiasaan yang dilakukan terus menerus sampai menjadi adat istiadat; kemudian berkembang menjadi tata kelakuan. Kebiasaan dan tata kelakuan merupakan cara manusia bertingkah laku yang sudah mempunyai struktur dalam kehidupan masyarakat. Menurut R. M. Mac Iver dan CH. dalam bukunya yang berjudul *society* bahwa lembaga merupakan bentuk-bentuk atau kondisi prosedur yang mapan, menjadi karakteristik bagi aktivitas kelompok. Sedangkan menurut Mayor Polak BIAF (1979), mengatakan bahwa lembaga atau sosial institution, adalah suatu kompleks atau system peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lembaga memiliki banyak arti, yaitu lembaga berarti asal sesuatu, dan acuan sesuatu yang memberi bentuk kepada yang lainnya, serta badan atau organisasi yang

¹⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga> diakses pada tanggal 27 maret 2022 pukul 10.00 WIB

bertujuan melakukan sesuatu penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha.¹⁵

Dengan itu lembaga merangkum berbagai aspek, yaitu kebiasaan, tata kelakuan, norma atau kaidah hukum. Hal ini ialah istilah lembaga merupakan kumpulan dari berbagai cara perilaku (*usage*) yang diakui oleh anggota masyarakat sebagai sarana untuk mengatur hubungan sosial.¹⁶

Lembaga adalah tempat atau wadah untuk orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.¹⁷

Konsep lembaga sudah banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku maupun adat istiadat. Dalam ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main dan kegiatan kolektif untuk kepentingan bersama. Dalam ilmu psikologi menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut pandang tingkah laku manusia. Sedangkan dari ilmu hukum melihatnya dari sudut hukum atau regulasinya serta instrumen dan litigasinya¹⁸

Ada 5 (Lima) istilah penekanan kelembagaan :

- a. Kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang tak dapat diganggu gugat atau permanen. Ia menjadi permanen karena dipandang rasional dan didasari oleh kebutuhannya dalam kehidupan. Suatu norma dan tata cara

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *kamus umum bahasa indonesia*, jakarta: Balai pustaka, 1987, hlm. 512

¹⁶ Abdulsyani, "*sosiologi s kematika, teori, dan terapan*", (Jakarta, 2018) hlm 75-76.

¹⁷ Tya-fisipl11.web.unair.ac.id, dikutip pada tanggal 11 april 2022 pukul 12.37 WIB

¹⁸ (Djoko, dkk, 2003).

yang bersifat tetap tersebut berada dalam suatu kelembagaan. Sejalan dengan itu Uphoff juga mengatakan bahwa kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang telah berjalan lama.

- b. Berkaitan dengan hal-hal yang abstrak menentukan sesuatu yang abstrak tersebut adalah yang kompleks. Ada hal-hal yang sesungguhnya terdiri dari beberapa bentuk yang tidak selevel. Hal yang abstrak ini kira-kira sama dengan apa yang disebut Cooley dengan *public mind* atau wujud ideal kebudayaan oleh Koentjaraningrat, atau kultural menurut Johnson. Secara garis besar, hal yang dimaksud terdiri dari nilai, norma, hukum, peraturan, pengetahuan, ide-ide *belief*, dan moral.
- c. Berkaitan dengan perilaku atau seperangkat *mores* (tata kelakuan) atau cara bertindak yang mantap yang berjalan di masyarakat (*establish way off behaving*). Perilaku yang terpolo merupakan kunci keteraturan hidup. Sebagaimana menurut Hebding, Institusi sosial ialah sesuatu yang selalu ada pada semua masyarakat, karena berguna untuk mempertemukan berbagai kebutuhan dan tujuan social yang nilai penting. Jika masyarakat ingin *survive*, maka Insitusi sosial harus ada. Keluarga misalnya, merupakan institusi sosial pokok yang mempertemukan kebutuhan sosial yang dinilai vital.
- d. Kelembagaan juga menenkankan pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi.
- e. Kelembagaan adalah cara-cara yang standar untuk memecahkan masalah. Tekanannya adalah pada kemampuan untuk memecahkan asalan.

Menyatakan bahwa Institusi sosial adalah nilai-nilai yang melekat pada masyarakat yang menyediakan stabilitas dan konsisten di masyarakat, yang berfungsi sebagai pengontrol dan pengatur perilaku. Menjamin situasi akan berulang, sehingga menjadi efektif. Efektivitas merupakan perhatian utama dalam apa yang dikenal dengan pemahaman “ekonomi kelembagaan”.¹⁹

Terdapat *dualisme* istilah pada pengertian lembaga, *dualisme* itu ialah organisasi dan kelembagaan itu sendiri. Lembaga bisa dikatakan sebagai suatu organisasi, namun pengertian lembaga itu sendiri tidak sama dengan pengertian organisasi. Memang pengertian di antara keduanya mengalami ambiguitas, seperti yang telah dikatakan oleh Uphoff bahwasannya istilah kelembagaan dan organisasi sering membingungkan dan bersifat *interchangeably*. Dalam mempelajari lebih lanjut tentang perbedaan di antara keduanya perlu menggunakan analisis yang cukup mendalam tentang. Lebih jauh dengan mengetahui perbedaannya, maka kita pun dapat menggunakan strategi yang berbeda untuk mengembangkannya. Dengan kata lain, strategi pengembangan kelembagaan berbeda dengan strategi pengembangan keorganisasian. Menyatukan keduanya sama halnya dengan memandukan pendekatan kultural dan pendekatan struktural dalam perubahan sosial.²⁰

Kata “kelembagaan” berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu “*institution*”, atau lebih tepatnya “*social institution*”, sedangkan

¹⁹ http://acitya-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-74972-ArtikellAN-pengertian%20Lembaga, dikutip pada tanggal 11 April 2022 pukul 13.15 WIB

²⁰ *Ibid...*, hlm.90

“organisasi” padanan dari “*organization*” atau “*social organization*”. Meskipun kedua kata ini sudah dikenal di masyarakat, namun pengertian dalam sosiologi berbeda. Kata “*institution*” sudah dikenal awal perkembangan ilmu sosiologi. Frasa seperti “*capital institution*” dan “*family institution*” sudah terdapat dalam tulisan sosiolog berbeda August Conte sebagai bapak pendiri ilmu sosiologi, semenjak abad ke 19. Disisi lain, konsep organisasi dalam pengertian yang sangat luas dan merupakan istilah pokok terutama dalam ilmu antropologi. Dua kata ini sering sekali menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ahli. Persoalannya terletak pada tekanan masing-masing orang yang berbeda-beda, atau sering mempertukarkan penggunaannya.²¹

3. Teori solidaritas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa solidaritas diambil dari kata solider yang berarti mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu dengan demikian, bila dikaitkan dengan kelompok social dapat disimpulkan bahwa solidaritas yaitu rasa kebersamaan dalam suatu kelompok tertentu yang menyangkut tentang kesetiakawanan dalam mencapai tujuan dan keinginan yang sama.²²

Dalam sejarah kata solidaritas menjadi sering digunakan sejak runtuhnya komunisme di Eropa (1989). Peristiwa ini tidak dipelopori oleh perjuangan sekelompok orang yang memiliki semangat solidaritas dengan

²¹ Acitiya, “*Penjernihan Istilah Lembaga dalam Dualisme Antara Kelembagaan dan Organisasi*” (18 Maret, 2013). Hlm. 3.

²² Suharso , Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Widia Karya, Semarang, 2011), hlm. 125

nama *Solidarnosc*. Kelompok ini merupakan kelompok masyarakat yang bekerja di Polandia, yang mulai dari perlawanan terhadap rezim komunisme di Negara tersebut. Kelompok ini di pimpin langsung oleh Lech Walesa. Awalnya tindakan ini di dorong oleh pemogokan yang terjadi di pabrik-pabrik sejak awal 1980-an. Kemudian dibentuklah kelompok bawah tanah dan diberi bernama *Solidarnocs* yang menuntut perbaikan tarif hidup, penganturan sistem pemeritahan, dan akses kepada media. Gerakan ini merupakan gerakan tanpa kekerasan yang mengajak semua pekerja untuk bergabung dan berjuang bersama. Seiring berjalannya waktu, gerakan ini memiliki pendukung yang semakin banyak dan menyebabkan efek yang semakin besar pula bila mereka melakukan pemogokan dan demonstrasi. Maka dari itu, pemerintah mengadakan pembicaraan serius dengan kelompok *Solidarnocs* ini dan sepakat mengadakan konfrensi meja bundar untuk merencanakan arah dan tindakan dalam mengatur Negara.²³

Secara etimologi arti solidaritas itu merupakan kesetiakawanan atau kekompakan. Dalam bahasa Arab berarti *tadhamun* (ketetapan dalam hubungan) atau *takaful* (saling menyempurnakan/melindungi). Pendapat lain mengemukakan bahwa solidaritas adalah kombinasi atau persetujuan dari seluruh elemen atau individu sebagai sebuah kelompok.²⁴

Dilingkungan kita dapat merasakan adanya rasa solidaritas yang tinggi atau kebersamaan banyak sekali, kebersamaan yang akan tercipta,

²³ Cristoporos Dika Adiatma, “*Solidaritas Nge-click*” (Universitas Sanata Dharma, 30 Mei 2016 8:56 am)

²⁴ <https://kumparan.com/berita-update/solidaritas-pengertian-jenis-dan-contohnya-lengkap-1x40vq5mLmV>

kebersamaan dalam hal baik maupun dalam hal buruk. Para pelajar yang terlibat tawuran mereka mengatakan bahwa mereka mempunyai rasa solidaritas yang tinggi jadi bila temannya ikut tawuran maka pelajar yang lainnya ikut tawuran. Inilah salah satu contoh sikap solidaritas yang sangat buruk yang banyak terjadi dan menimpa para pelajar di Indonesia, seharusnya rasa solidaritas digunakan untuk hal-hal yang baik misalnya dalam hal belajar bersama ataupun berkorban. jadi dapat disimpulkan bahwa solidaritas adalah rasa kebersamaan, rasa kesatuan, rasa kepentingan, rasa simpati, sebagai salah satu anggota dari kelas yang sama. Atau bisa diartikan perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama.

Menurut Emile Durkheim solidaritas dapat dibagi menjadi dua jenis yakni solidaritas mekanik dan solidaritas organik.

Solidaritas mekanik adalah solidaritas kesadaran kolektif yang berlaku disuatu masyarakat yang tanpa protes memenuhi sebuah aturan, norma, atau kepercayaan yang sama. Biasanya berkembang di desa-desa yang masih kental akan nilai tradisionalnya. Penduduknya secara umum memiliki suatu pekerjaan yang sama atau hampir mirip. Solidaritas mekanik bisa membuat suatu komunitas masyarakat menjadi akrab dan erat. Sosiologi mengenalnya sebagai kata *guyub* atau *rukun* untuk menyebut keakraban yang timbul oleh pelaku solidaritas mekanik. Di dalam masyarakat yang menganut solidaritas mekanik sistem hukumnya bersifat represi (menekan, menindas). Misalnya cemoohan dengan maksud

menggores mengoreksi perilaku seseorang agar kembali sesuai dengan aturan, mengusir, memukul dan sebagainya. Contoh:

- a. Di pedesaan terdapat jadwal ronda yang harus dijalani setiap warganya secara bergantian. Hal ini tujuannya untuk menjaga keamanan warga dimalam hari. Warga juga diwajibkan membayar iuran untuk konsumsi peronda.
- b. Seseorang yang mangkir berturut-turut ronda akan diberikan teguran atau sanksi cemohan di masyarakat. Yang kemudian memaksanya untuk menebus kesalahan tersebut selanjutnya.
- c. Apabila menemukan maling, masyarakat lebih sering memukul atau menghakimi sendiri (*represif*).²⁵

Menurut George Ritzer menjelaskan bahwa solidaritas organik lahir dari perbedaan para anggota suatu komunitas, masyarakat, atau kelompok. Solidaritas organik terjadi karena adanya tugas dan tanggung jawab yang tidak sama atau berbeda. Spesialisasi atas aktifitas atau pekerjaan ini menyebabkan pekerja yang relative sempit. Oleh karena itu, ada kemakmuran atau kewajiban dalam kelompok terhadap perilaku kelompok lainnya apabila kurang mematuhi suatu aturan yang juga tidak terlalu mengikat.

Masyarakat yang menganut solidaritas organik banyak terjadi di perkotaan, oleh karena itu kompleksitas kondisi yang ada. Hukuman bagi pelanggar aturan lebih lunak dan bersifat restitutif biasanya hanya berupa

²⁵ Andi Tenri Citra Haris, *Solidaritas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan*, (Jogyakarta, 2020), Hlm.7

sanksi, denda dan sebagainya. Hukuman tersebut dimaksud sebagai ganti rugi atas perbuatan sehingga dapat dikatakan longgar bagi pelanggar.

Contohnya:

- a. Di perkotaan jenis pekerjaan sangat kompleks dan beragam. Oleh karena itu masyarakat jarang berkumpul. Kondisi tersebut menyebabkan pembagian tugas keamanan seperti ronda bisa tidak teratur bahkan terkadang dilanggar. Konsumsi rondapun secara umum dibeli oleh para peronda sendiri, tidak dari iuran masyarakat.
- b. Bagi yang tidak mengikuti ronda biasanya sering diberikan hukuman ganti rugi misalnya dengan denda 50-100 ribu rupiah.
- c. Meski ada kejadian penangkapan maling di perkotaan, tetapi main hakim sendiri tidak banyak terjadi. Masyarakat lebih sukarela menyerahkannya kepetugas berwenang (polisi). Sanksi yang diberikan bisa berupa pemenjaraan.²⁶

4. Tinjauan Teori Perempuan

Perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Hawa diciptkan dari tulang rusuk Nabi Adam. Filosofi inilah yang kemudian menyebabkan kesan negatif pada diri perempuan. Seolah-olah perempuan adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka harus dikasihani dan dilindungi. Lalu muncul anggapan bahwa perempuan derajatnya lebih rendah daripada laki-

²⁶ <https://www.sosiologi.info/2021/11/teori-solidaritas-sosial-emile-durkheim-mekanik-organik-contohnya>

laki. Kodrat perempuan seputar dapur, sumur, kasur, menjadi sigma negatif. Dalam gender, pola relasi seperti ini dianggap tidak adil.²⁷

Istilah perempuan umumnya digunakan untuk manusia segala umur. Sebutan umum untuk orang dewasa berjenis kelamin perempuan disebut wanita. Sementara itu, istilah untuk anak-anak yang berjenis kelamin perempuan disebut anak perempuan “cewek” atau “gadis”.²⁸

Menurut teori populer, kata perempuan bersal dari kata “*empu*” dalam bahasa jawa kuno, yang kemudian yang diserap dalam bahasa melayu, yang berarti “tuan, mulia, hormat”. Kata *empu* tersebut mengalami pengimbuhan dengan penambahan “*per-* dan *an*” yang dikemudia membentuk kata “*perempuan*”. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa kata *empu* adalah sperempuan berhubungan dengan kata *empu* yang berarti “sokong penyangga”.²⁹

Perempuan adalah manusia yang memiliki karakteristik fisiologis yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan yang jelas dari segi fisik antara laki-laki dan perempuan di antaranya adalah pertumbuhan tingian badan, payudara, rambut, organ genitalia, serta jenis hormonal lainnya yang mempengaruhi ciri fisik dan biologisnya. Citra perempuan umumnya adalah makhluk yang emosional, lemah, mudah menyerah, pasif serta subjektif, mudah terpengaruh. Perempuan juga dicitrakan manusia yang emosional serta tidak stabil. Persepsi tersebut didasarkan pada ketidakstabilan

²⁷ Farida Nurani, *Buruh Migran Perempuan* (Malang, 2017) hlm. 5

²⁸ Ibid hlm. 3

²⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/perempuan>

hormonal yang mempengaruhi emosi perempuan yang terj adi ketika perempuan mengalami siklus hormonal pada saat haidh.³⁰

5. Tinjauan Teori Perlindungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi, sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker, secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu juga perlindungan mengandung makna pengayoman yang diberikan seseorang terhadap orang yang lebih lemah.³¹

Kata perlindungan secara bahasa memiliki kesamaan unsur-unsur, yaitu Unsur tindakan melindungi, Unsur pihak yang melindungi dan unsur cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukkan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Perlindungan dilihat secara umum memiliki arti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna yaitu pengayoman yang diberikan oleh seseorang

³⁰ Ibid hlm. 2

³¹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan-Medan Area University Pers,2012,Hlm. 5-6

kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjalani adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga Negara agar haknya sebagai seorang warga Negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebagai dan setanah air.³²

Perlindungan merupakan sesuatu yang diberikan subjek dalam bentuk perangkat yang baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan ialah sebagai suatu gambaran dari fungsi itu sendiri, yang konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

6. Tinjauan Buruh Migran

Istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau buruh migran Indonesia (BMI) belum sepopuler istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) pengertian PMI, BMI, TKI, dan TKW sama, yaitu warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Secara bahasa, pekerja artinya orang yang menerima upah atas hasil kerjanya, orang yang bekerja, buruh, atau karyawan. Migran artinya orang yang melakukan migrasi

³² Ibid..., hlm. 7

(pindah) dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks kerjanya. Orang yang bekerja, buruh, atau karyawan. Dengan demikian, pengertian buruh migran adalah orang yang bekerja di luar negeri atau di luar negaranya. Secara formal, warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebagaimana Undang-Undang nomor 18 tahun 2007 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.³³

Buruh migran adalah istilah yang digunakan untuk individu atau kelompok yang berpindah (migrasi) dari tempat kelahiran atau tempat tinggal menurut dokumentasi kependudukan resmi yang bersifat tetap (permanen). Tujuan mereka berpindah ialah secara umum adalah untuk keperluan pekerjaan (buruh), sehingga menetap pada lokasi tempat kerja tersebut dalam kurung waktu tertentu. Secara kasar, definisi buruh migran yakni lebih sering ditunjukkan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri. Akan tetapi, definisi tersebut hanya berlaku pada buruh migran eksternal yang tidak mencakup buruh migran internal yang bekerja di dalam negeri.³⁴

Secara definisi, buruh migran terbagi menjadi dua jenis yaitu buruh migran eksternal dan internal. Adapun pengertian buruh migran eksternal adalah mereka yang menjadi tenaga kerja Indonesia. Sedangkan buruh migran internal yaitu mereka yang bekerja didalam negeri yang hanya berpindah tempat tinggal tetapi tidak dengan dokumen kependudukan.³⁵

³³ Satjipo Raharjo, *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*, Bandung :Alumni, 1974, Hlm. 74

³⁴ Ana Sabbana Azmy, *Negara Dan Buruh Migran Perempuan*, Jakarta 2012. Hal. 8

³⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh_Migran.

Teori mengenai tentang Buruh Migran Migrasi merangkum berbagai pendekatan dalam menjelaskan proses migrasi seperti pendekatan teori ekonomi pendekatan psikologi dan pendekatan demografi dan geografi . secara garis besar melihat proses migrasi berdasarkan tiga teori. Teori pertama adalah neoklasik yang melihat hubungan positif antara migrasi dan pembangunan. Teori berikutnya yaitu struktur historis yang cenderung lebih pesimis melihat relasi antara migrasi dan pembangunan dan teori terakhir yang menjembatani teori neoklasik dan structural historis yaitu *migrant network* yang menekankan pentingnya jaringan sosial dan rumah tangga.³⁶

Pada dasarnya pekerja, buruh dan tenaga kerja maupun karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia, “Buruh” diartikan sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja dan karyawan merupakan sebutan untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini mempunyai arti yang satu yaitu pekerja. Hal ini terutama merujuk pada undang-undang ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia.³⁷

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan cara melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan

³⁶ Wahyu Utamidewi, Deddy Mulyana, dan Edwin Rizal “Pengalaman Komunikasi Keluarga Pada Mantan Buruh Migran Perempuan”, *Jurnal Kajian Komunikasi* 5 (1), 69-80, 2017

³⁷ Nurul Aeni “Eksistensi Buruh Migran Perempuan dan Gambaran Kemiskinan Kabupaten Pati”, *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian Pengembangan Dan Pengembangan* 13 (2), 139-148 2017

dengan masalah itu, yang dilakukan oleh penelitian secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahan masalahnya.³⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan Studi Kasus (*Case Studies*). Pendekatan studi kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang orang, kejadian, *social setting* (latar sosial), atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik, serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar alami (*social setting*) itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya.³⁹

Oleh karena itu bahwa dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah menggunakan pendekatan penelitian studi kasus instrumental (*instrumental case studies*), motivasi utama peneliti menggunakan penelitian studi kasus instrumental ialah peneliti sangat ingin memahami atau menekankan pada pemahaman tentang suatu isu atau merumuskan kembali (*redefine*) suatu penjelasan secara teoritis. Selain itu studi kasus instrumental ini juga lebih mendalam dan mencakup semua aspek baik sosial, agama, dan budaya serta membahas kejadian secara terperinci.

Berikut adalah beberapa langkah-langkah dalam penelitian studi kasus yang akan menjadi fokus utama peneliti dalam mencari data:

³⁸ Narbuko Cholid, Acmadi Abu, “*Metode Penelitian: Memberi bekal teoritis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*”, (Jakarta: Bumi Askara, 2015), hlm. 2

³⁹ *Ibid.*, hlm. 339

- a. Peneliti akan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti serta merumuskan tujuan yang akan dicapai secara jelas dan lugas,
- b. Penelitian akan merumuskan kasus yang akan dipelajari ketika saat berada dilapangan, oleh karena itu dalam konteks ini peneliti akan merincikan kasus yang akan diteliti.
- c. Menentukan kerangka penelitian kasus secara kontekstual dan teoritis
- d. Cara pendekatan yang akan peneliti gunakan guna mendapatkan data yang berasal dari sumber-sumber terpercaya.
- e. Kemudian peneliti akan mempersiapkan dengan matang untuk mengumpulkan data baik data yang berupa primer maupun sekunder dalam rangka mendapatkan data sebanyak-banyaknya.
- f. Setelah peneliti mendapatkan data-data langkah selanjutnya yang akan peneliti fokuskan adalah mengevaluasi dan mengorganisasikan sehingga menjadi kontruksi yang koheren.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif dengan hadirnya peneliti di lokasi penelitian sangatlah berperan penting sebagai instrument kunci sekaligus berperan sebagai pengumpulan data demi memperoleh keabsahan data. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian perlu di gambarkan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu juga dijelaskan apakah kehadiran peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat pasrtisipan, atau pengamat penuh. Oleh

karena itu untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka peneliti membutuhkan alat instrument, antara lain, sebagai berikut:⁴⁰

- a. Melaksanakan observasi ketempat penelitian
- b. Melakukan wawancara tatap muka dengan pihak yang bersangkutan
- c. Melakukan pencatatan (dokumentasi) mengenai segala data yang dibutuhkan

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Adapun alasan peneliti dalam memilih tempat ini ialah pada dasarnya di Desa Kekerri banyak sekali perempuan buruh migran yang mendapatkan perlindungan oleh lembaga Solidaritas Perempuan.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu, data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang akan diperoleh tanpa melibatkan perantara siapapun melainkan peneliti langsung terjun ke masyarakat. Data yang akan diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan dengan informan kunci, utama, dan pendukung yang dipilih dan dapat dipercaya untuk dapat menghasilkan data yang sah dan benar. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah

⁴⁰ Jamaluddin, “*Relasi Sosial Minoritas Muslim Di Kalangan Mayoritas Kristen (Studi Kasus Di Dusun Nggeru Kecamatan Donngo Kabupaten Bima)*” Skripsi Jurnal Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram Tahun 2020, Hlm. 18

perempuan buruh migran di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung namun peran data sekunder dapat diperlukan sebagai pelengkap dari data peneliti. Adapun yang akan menjadi sumber dari penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, artikel, dan internet. Dari sumber data yang menjadi pelengkap data peneliti diatas membuat peneliti mudah mendapatkan data atau referensi mengenai penelitian yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling strategis, karena dengan teknik ini pula akan menentukan kualitas data peneliti. Untuk mendapatkan data yang valid, relevan dan yang sesuai dengan harapan maka peneliti akan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Adalah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak di sebut data atau informasi yang harus diamati dan catat benar dan lengkap. Observasi juga dapat diartikan sebagai peneliti bersama partisipan. Jadi keberadaan peneliti dilapangan tidak hanya sekedar numpang lewat atau bersua foto melainkan peneliti memperoleh data dan informasi yang tersembunyi dan mungkin tidak terungkap selama wawancara. Metode atau pengamatan adalah sebuah

kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan panca indera mata dan di bantu oleh panca indera lainnya. Adapun beberapa bentuk observasi, yaitu:⁴¹

- 1) Observasi Partisipasi (*participant observation*) adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun dan penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
- 2) Observasi tidak struktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi.

Adapun proses observasi yang akan peneliti lakukan ialah dimulai dengan mengidentifikasi, dilakukan dengan membuat pemetaan sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian kemudian peneliti akan mengidentifikasi kembali siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana peran lembaga solidaritas perempuan dalam melindungi perempuan buruh migran.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dapat dikatakan juga wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancara

⁴¹ Muri Yusuf, Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan), Cetakan Ketiga, (Padang: Prenadamedia, 2013), hlm: 384

(interview) melalui komunikasi langsung. Berikut model-model wawancara.⁴²

- 1) Wawancara tidak terstruktur, wawancara yang bebas dilakukan di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.
- 2) Wawancara terstruktur merupakan teknik wawancara yang dimana pewawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik dan menyusun poin-poin penting atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan.

Adapun metode wawancara yang akan peneliti lakukan yaitu mempersiapkan segala daftar pertanyaan (*instrumen*) dalam bentuk pedoman wawancara kemudian peneliti akan mewawancarai responden yaitu santriwati dengan situasi yang santai untuk itu peneliti perlu mencarikan. Wawancara akan peneliti buka mulai dari perkenalan dan menciptakan situasi yang kondusif setelah itu pertanyaan-pertanyaan diajukan baik sifatnya terstruktur ataupun tidak *terstruktur*, dalam proses interview responden, peneliti selain bertanya dan menyimak jawabannya juga akan mencatat jawaban-jawaban yang dilontarkan lazimnya catatan dibuat secara singkat supaya proses wawancara tidak terputus, demi mendapatkan data yang lengkap dan terperinci. Adapun yang akan

⁴² *Ibid.*, hlm. 376

diwawancarai oleh peneliti yaitu perempuan buruh migran dan ketua pimpina lembaga solidaritas perempuan

c. Metode Dokumentasi

Setelah menggunakan metode observasi dan wawancara, sebagian data dalam penelitian ini juga akan dikumpulkan dengan cara dokumentasi. Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai data hal-hal atau variabel yang berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁴³

Dalam penggunaannya sebagai metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, yakni data yang berupa catatan, gambar, buku dan lain-lain berkaitan dengan pembahasan penelitian [una membantu serta memperlancarkan dalam rangka pengumpulan data.⁴⁴

Adapun buku-buku yang penulis akan gunakan adalah buku yang berkaitan tentang solidaritas, kemudian dari pada itu mendokumentasikan semua data dengan menggunakan kamera agar dapat mengabadikan aktivitas dan kehidupan santriwat.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk mencari data secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan

⁴³ Salim, Haidir, *“Penelitian Pendidikan (Metode, Pendekatan, Dan Jenis)”*, (Jakarta” Kencana, 2019), hlm. 100

⁴⁴ Maulidiah Kurniawati, *“Kehidupan Keagamaan Masyarakat Nelayan di Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2017”. Skripsi Program Studi Perbandingan Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.

pemahaman peneliti tentang permasalahan yang teliti.⁴⁵ Dalam metode analisis data, peneliti menggunakan analisa data kualitatif dengan [menggunakan model Miles dan Huberman. Langkah-langkah analisis data antaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi (kesimpulan).

a. Reduksi data Proses

Reduksi data adalah peneliti memilah data yang telah ditemukan pada objek selama proses penelitian.⁴⁶ Data yang telah dipilih akan memberikan pemahaman lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan berbagai data yang didapatkan dilapangan, wawancara, foto, dokumen serta catatan penting lainnya yang berhubungan dengan mahasiswi bercadar. Setelah proses reduksi dan data dilakukan maka proses selanjutnya adalah memaparkan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁷ Setelah mendapatkan data yang diperoleh secara keseluruhan, maka penelitian harus memilah lagi agar kiranya lebih mudah untuk dipahami dan merencanakan langkah-langkah berikutnya yang lebih mengacu pada

⁴⁵ Noeng Muhadjir *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2016), hlm. 245

⁴⁶ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama (UIN-Maliki Press: Sukses Offset Yogyakarta, 2008), hlm. 119.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 249

data-data yang didapatkan sebelumnya. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman, kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan analisis sajian data.

c. Verifikasi (kesimpulan)

Pada langkah penarikan kesimpulan ini yakni tahap terakhir dalam metode kualitatif. Penelitian yang sudah didapati dan yang sudah dikelompokkan, kemudian menjelaskan hasil temuan yang didapat dan menarik kesimpulan dari penjelasan diatas. Kesimpulannya disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.⁴⁸

7. Pengecekan Keabsahan Data

Proses penarikan kesimpulan yang akan dilakukan dalam penelitian memiliki tujuan untuk membuktikan bahwa apakah data yang diperoleh dari lapangan sungguh valid atau bahkan tidak, oleh karenanya menggabungkan dengan landasan teori yang telah menjadi landasan hasil pada tujuan penelitian dilapangan.

Dalam pnelitian kualitatif temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁴⁹ Adapun tujuan dari uji

⁴⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), 142.

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), Hlm. 119.

keabsahan data adalah untuk memperoleh data yang valid dan reliable dalam rangka mencari akar sumber datanya serta apakah data yang diberikan triangulasi dengan nyata atau yang dilapangan.

Berdasarkan penejelasan diatas, demi mendapatkan sebuah data yang benar-benar abash peneliti menggunakan teknik keabsahan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat, intersif, dan kesinambungan. Dengan cara diatas maka dapat dipastikan bahwa data dan urutan peristiwa akan bisa direkam secara mutlak dan sistematis. Meningkatkan ketekunan juga dapat di ibaratkan layaknya kita mengecek soal dan jawaban atau makalah yang telah dikerjakan apakah ada kesalahan atau tidak.

b. Triangulasi

1) Triangulasi Metode

Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan suvei.

2) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan tteknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, akan memberikan data yang valid sehingga lebih kridibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawncara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.



Perpustakaan **UIN Mataram**

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Lembaga Solidaritas Perempuan (SP)

Pada tanggal 10 Desember 1990 KSP yang terdiri dari Ati Nurbati Karta Hardimadja, Gracia Tjita Andang Setjati, Nursyahbany KatjaSungkana dan Taty Krisnawati bersama dengan beberapa sahabat perempuan mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan yayasan solidaritas perempaun. Susunan dewan pengurus 1990-1993, terdiri dari Ati Nurbaiti (Ketua), Nursyahbani Katjasungkana (Wakil Ketua), Gracia Tjita A, (Bendahara), Taty Krisnawaty (Sekretaris Merangkap Koordinator Program). Program dari yayasan adalah pengembangan institusi yayasan dan pengembangan hak asasi manusia dengan cita-citanya adalah untuk mencapai masyarakat yang demokratis dan egaliter.⁵⁰

2. Solidaritas Perempuan (SP) Mataram

Komunitas ini awalnya berdiri sebagai langkah menyatukan kekuatan untuk mengadvokasi persoalan buruh Migran NTB yang pada saat itu tengah mengalami banyak kasus kekerasan dan pelanggaran hak sementara di daerah belum memiliki kebijakan yang melindungi hak buruh migran khususnya buruh migran perempuan. Komunitas ini diberi nama komunitas Mataram sesuai nama ibu kota provinsi NTB sebagai wilayah

⁵⁰ Profil Lembaga Sp, Di Dokumentasi Pada Tanggal 20 Mei 2022

kerjanya dan asal anggotanya yang berasal dari pulau lombok dan pulau sumbawa, NTB.

Tahun ini SP Mataram telah berusia 15 tahun dan telah terbelah menjadi dua komunitas yaitu: komunitas Mataram dan Sumbawa. Keputusan untuk mendirikan komunitas baru di Sumbawa sebagai langkah strategis mengatasi personal geografis yang cukup jauh antara dua pulau yang menjadi tantangan dalam pengorganisasian dan menghambat proses pelaksanaan rapat-rapat pengambilan keputusan tinggi perserikatan atau komunitas yang mengharuskan jumlah forum sedikit kehadiran anggota.

Namun, meski telah terbagi menjadi dua komunitas SP Mataram tetap melakukan advokasi dan merespon isu2 perempuan di level propinsi dan tidak hanya melakukan advokasi isu di pulau lombok. Selama 15 tahun usianya SP Mataram berkembang dengan jumlah anggota sebanyak 51 orang terdiri dari 45 orang perempuan dan 6 orang laki-laki dan tidak hanya berfokus pada isu buruh migran. Saat ini ada empat isu yang di tangani oleh SP Mataram, yaitu: 1). isu-isu perempuan, migran, trafficking dan HIV/AIDS. 2). Isu perempuan dan kedaulatan pangan. 3). Isu perempuan dan politisasi agama. 4). Penguatan organisasi.

Komunikasi solidaritas perempuan mataram, wilayah yang memiliki konteks advokasi pada kontesk itu kedaulatan perempuan atas seksualitas memiliki tujuan memperkuat perempuan akar rumput memiliki kesadaran atas seskulitas, mempertanyakan dan menadvokasi penindasan atas seksualita yang terjadi dikomukasi. Isu kedaulatan

perempuan melawan kedaulatan bebas dan investais memiliki tujuan memperkuat akses dan kontrol serta inisiatif perempuan atas lahan pertanian lokal untuk melawan penetrasi globalisasi.

Solidaritas Perempuan (SP) Mataram yang terletak di jalan melati raya nomor 303 kelurahan rembige kecamatan gunung sari kabupaten lombok barat, memiliki jumlah 59 orang dan 3 pengurus yang titik fokus kerjanya terlteka pada buruh migran dan kedaulatan pangan, wilayah yang menjadi pengorganisasian ialah di mambalan, kekeri dan ketapang.

Tabel 2.1
Nama-Nama Pegawai Lembaga Solidaritas Perempuan.⁵¹

Nama	Jabatan
Nurul utami	Ketua
Johariyah	Sekretaris
Zianawati	Bendahara
Eli Sukemi Dan Lutfatul Azizah	Dewan Pengawasan Komunitas (DPK)
Siti Nur Hidayati, Baiq Sumiatun, Siti Nurul Kolby, Martini, Hayatun, Erma Dan Rini.	Anggota

3. Visi-misi Lembaga Solidaritas Perempuan (SP)

a. Visi

Mewujudkan tatanan sosial yang demokratis berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme, dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, dimana keduanya dapat berbagi akses dan

⁵¹ *Ibid tanggal 20 Mei 2022*

kontrol dan atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil.

Perserikatan ini berdasarkan keutuhan hak asasi manusia yang bersifat universal, menolak deskriminasi terhadap perempuan dan anti kekerasan terhadap perempuan. Perangkat dari konflik dari sumber alam untuk menurunkan tingkat penindasan yang bertujuan untuk mengubah agar lebih adil, demokratis, menghargai keberagaman, anti kekerasan, dan arena melihat dari sumber daya alam SP juga melihat dari ekologis yang berpengaruh terhadap kehidupan perempuan bagaimana perempuan berelasi dengan sumber-sumber kehidupan.

b. Misi

- 1) Turut membangun kekuatan perempuan seluruh Indonesia.
- 2) Menjalani kerja sama dengan gerakan perempuana di seluruh dunia
- 3) Memperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap perempuan, terutama kelas marjinal dan tertindas
- 4) Memajukan, membela, dan meningkatkan kesadaran hak asasi manusia dengan fokus pada hak perempuan
- 5) Memperjuangkan terjadinya perubahan nilai, sikap dan perilaku yang merupakan manifestasi dari ideologi patriarkhi
- 6) Memperjuangkan nilai-nilai feminis kedalam berbagai sistem hukum dan kebijakan
- 7) Melakukan berbagai iktiar lain yang sah tidak bertentangan dengan asas dan tujuan perserikatan.

4. Program Lembaga Solidaritas (SP) Perempuan

Dalam melaksanakan tugasnya lembaga solidaritas perempuan memiliki program-program untuk membantu para buruh perempuan.

a. Program Perlindungan terhadap perempuan Migrasi trafficking dan HIV AIDS.

Di adakan sebagai upaya untuk mengembangkan gerakan feminis yang berdasar pada buruh migran perempuan baik calon maupun mantan bersama keluarganya untuk melakukan perlawanan terhadap ketimpangan keadilan dan diskriminasi gender serta pemiskinan yang diakibatkan oleh politik negara dan non negara. Tidak hanya itu program ini juga hadir sebagai upaya mendukung perlindungan dari kerentangan terhadap trafficking, HIV dan juga AIDS, baik di tingkat lokal, nasional, regional bahkan internasional.

b. Program Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam

Berfokus pada pembangunan yang masif dan sistematis serta di landasi oleh paham feiminisme untuk melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi karena perempuan kehilangan akses serta kontrol terhadap sumber-sumber kehidupan yang mana terancam oleh kerusakan yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam oleh politik negara maupun non negara.

c. Program Perempuan dan Kedaulatan Pangan

Mengarah pada pergerakan feminis melawan tangan besi negara dan non negara, sehingga perempuan memiliki akses untuk memproduksi, mengelola, mendistribusi, dan mengonsumsi pangan sendiri.

d. Program Perempuan dan Politisasi Agama

Diadakan untuk memahami dan menyadarkan perempuan akar rumput mengenai fenomena fundamentalisme agama serta politisasi agama dan hak otonomi seksualitas juga tubuh perempuan. Melakukan advokasi terhadap diskriminasi akibat fundamentalisme agama. Solidaritas perempuan berkomunikasi akar rumput lain untuk memerangi radikalisme agama yang mengatur tubuh dan pikiran perempuan.

e. Program Penguatan Organisasi Perempuan

Mencetak modul feminis untuk membantu penguatan dan pengorganisasian perempuan di akar rumput, meningkatkan kapasitas para anggota sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-masing serta mendorong keaktifan para anggota dalam bertukar informasi, pengalaman, serta kapasitas antar negara.

B. Hasil Temuan

1. Kondisi perempuan migran di desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari

Salah satu kelompok perempuan yang sering mengalami ketidakadilan adalah para buruh migran perempuan. Ketidakadilan yang mereka alami terjadi berlapis dari sebelum berangkat ke luar negeri, di

negara yang mereka datangi, bahkan sampai kepulangan mereka kembali ke Indonesia.

Berdasarkan pemantauan kebijakan dan pengalaman penanganan kasus Solidaritas Perempuan, NR menilai bahwa telah terjadi pembiaran negara terhadap perlindungan hak-hak Buruh Migran Perempuan dan keluarganya. Situasi tersebut terlihat dengan lemahnya tanggung jawab negara terkait perlindungan Buruh Migran Perempuan akibat tidak adanya kebijakan yang melindungi Buruh Migran Perempuan dan keluarganya secara komprehensif. Minimnya perlindungan hak Buruh Migran Perempuan merupakan implikasi dari paradigma pemerintah yang cenderung mengkomodifikasi Buruh Migran Perempuan dan lebih mementingkan aspek penempatan daripada perlindungannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan negara yang bermula dari UU No. 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI di Luar Negeri (PPTKILN) yang lebih melihat buruh migran sebagai entitas komoditas perniagaan dari pada manusia yang hak-haknya harus dilindungi.

Pemerintah Indonesia dalam membangun sistem dan menangani buruh migran belum menggunakan kerangka HAM. Ini dibuktikan dengan situasi saat ini dimana Indonesia belum meratifikasi Konvensi Migran 1990 yang menjamin perlindungan buruh migran dan anggota keluarga di semua tahapan proses migrasi (persiapan bermigrasi, keberangkatan, transit, dan kepulangan ke Negara asal dan kampung halaman).

Dalam Konvensi Migran 1990 ini, buruh migran dilindungi dari kondisi hidup dan kondisi kerja buruh migran yang tidak manusiawi, sasaran penyiksaan atau tindakan kejam, perlakuan tidak manusiawi atau perlakuan yang menurunkan martabat; untuk tidak dijadikan budak; kerja paksa; kekerasan fisik, sexual serta perlakuan yang buruk.

Konvensi ini menjamin hak-hak BM untuk memiliki kebebasan berfikir, berekspresi dan beragama, menikmati perlakuan yang tidak berbeda dari yang diberikan kepada penduduk di Negara tempat kerja, terkait dengan upah dan kondisi lain dari pekerjaan serta membentuk serikat asosiasi dan serikat pekerja, akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial.

Konvensi ini juga menjamin akses Buruh Migran terhadap informasi terkait dengan hak mereka, kesamaan di muka hukum, akses untuk mendapat pelayanan dan tidak dihukum secara tidak proporsional seperti pengusiran; hak Buruh Migran untuk kembali ke Negara asal melakukan partisipasi politik di Negara asal serta untuk mengirimkan uang hasil kerjanya ke negara asal. Akibat belum meratifikasi Konvensi tersebut, pemerintah belum mempunyai sistem perlindungan BMI serta kewajiban hukum untuk memenuhi hak-hak buruh migran sebagaimana tercantum dalam konvensi tersebut. Dari aspek substansi, UU yang ada yaitu UUPPTKILN lebih mengatur aspek tata niaga daripada aspek perlindungan hak-hak buruh migran. Dari 109 (seratus sembilan) pasal, hanya 8 (delapan)

pasal yang berjudul perlindungan. Pun setelah dianalisa, pasal-pasal tersebut nyatanya tidak betul-betul melindungi buruh migran.

Dari aspek kinerja aparat pemerintah, terlihat bahwa respon dan penanganan buruh migran tidak berjalan secara sistematis dan komprehensif. Berbagai respon dilakukan hanya bersifat reaksioner, tanpa menyentuh akar persoalan yaitu sistem perlindungan buruh migran yang berperspektif gender dan HAM. Akibatnya banyak buruh migran yang mengalami kesulitan dalam menuntut dan mengakses hak-haknya yang terlanggar. Lebih parah lagi, banyak buruh migran perempuan yang mengalami *revictimisasi*, dipersalahkan (*victim blaming*) pada saat mereka mencoba menyampaikan pengaduan atau berkoordinasi dengan aparat pemerintah untuk menangani kasus pelanggaran.

Dari aspek budaya hukum, belum adanya kerangka HAM pada sistem penempatan buruh migran Indonesia terus menempatkan Buruh Migran Perempuan rentan terhadap berbagai ketidakadilan gender seperti *stereotyping*, *sub-ordinasi*, beban ganda, kekerasan, dan diskriminasi. Situasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa Buruh migran terus dipandang sebagai sumber devisa bagi negara semata dan luput bahwa buruh migran perempuan adalah manusia yang melekat hak-haknya baik sebagai pekerja, sebagai warga negara, maupun sebagai perempuan.

Cara pandang bahwa buruh migran sebagai sumber bisnis juga berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak-hak mereka. Pihak-pihak terkait penempatan Buruh Migran Perempuan seperti PPTKIS dan cabang-

cabangnya, sponsor, calo, pelaksana tes kesehatan, BLK, petugas PAP belum melihat BMP sebagai manusia yang harus dipenuhi haknya. Pandangan tersebut selain menghambat perlindungan hak buruh migran juga merentankan BMP menjadi korban berbagai eksploitasi selama proses migrasi baik saat sebelum berangkat hingga kepulangan. Selain itu, aparat pemerintah dan DPR masih banyak yang menstigma BMP PRT sebagai pihak yang acapkali menurunkan harkat martabat bangsa di luar negeri daripada sebagai warga negara yang harus mendapatkan hak-haknya.

Mandat program ini diarahkan pada upaya-upaya untuk membangun gerakan feminis berbasis pada Buruh Migran Perempuan (termasuk calon dan mantan) beserta keluarganya untuk melawan ketidakadilan gender dan pemiskinan akibat politik Negara dan non-negara, agar mereka mampu memiliki akses dan kontrol atas hak-haknya dan keputusan politik yang menentukan hidupnya. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka mempunyai kekuatan atau kemampuan dalam pertama, memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Kedua menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, ketiga

berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi.⁵²

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori pemberdayaan yang dilakukan Solidaritas Perempuan di karenakan adanya pemberdayaan yang dilakukan Solidaritas Perempuan dalam bentuk penguatan terhadap buruh migran dan keluarganya. Berikut hasil wawancara dengan ST selaku staff penguatan organisasi:

Pemberdayaan jelas karena bagian dari strategi kita, supaya perempuan itu bisa kritis. Mandat kita itu jelas. Yaitu perempuan marginal tidak punya akses, control, edukasi rendahpokoknya sangat terbataslah ruang-ruang dan juga akses. Kita sebutnya perempuan marginal dikampung.⁵³

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh ES, selaku staff Penanganan Kasus Divisi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Berikut penuturannya:

Pemberdayaan sih kalo kita itu istilahnya penguatan ya, penguatan terhadap buruh migran perempuan dan keluarganya. Nah penguatannya dari mana ya dari diskusi-diskusi, peningkatan-peningkatan kapasitas, melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan Solidaritas Perempuan, Mengikut sertakan mereka dalam penanganan kasus di Solidaritas Perempuan.⁵⁴

Jika melihat dari sejarah berdirinya Solidaritas Perempuan terbentuk atas dasar banyaknya isu-isu perempuan terkait konflik perempuan yang terjadi karena pemikiran tentang kurang edukasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam melihat perempuan yang masih dilihat entitas yang tidak

⁵² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama,2007), hlm. 57

⁵³ Siti, "Staf penguatan Organisasi", *Wawancara*, Gunung Sari 19 Mei 2022.

⁵⁴ . Eli sukaemi, "staff penanganan kasus devisi perlindungan", *Wawancara*, Gunung sari 19 Mei 2022

penting didalam masyarakat. Selanjutnya peneliti fokus pada divisi perlindungan buruh migran dan keluarganya. Seperti yang disampaikan oleh saudari LA, berikut penuturannya:

Solidaritas Perempuan tidak melihat isu secara kotak-kotak tetapi menjadi satu kesatuan, tidak semua perempuan punya akses terhadap sumber-sumber kehidupan sehingga perempuan buruh migran menjadi minim perlindungan dari Negara. Ada yang di eksekusi mati di arab Saudi, jadi itu juga tidak ada pemberitahuan ke pemerintah serta keluarga. Itu terjadi dibanyak tempat tidak ada perlindungan sama sekali, sudah di kampung halamannya tidak ada penghidupan sama sekali dinegara orang tidak mendapat perlindungan. Padahal devisa yang masuk kenegara masuk kedalam lima desar devisa Negara. Dilain sisi kita tidak sepakat pada mobilisasi perempuan, ada monatorium atau pemberhentian pengiriman buruh migran ke Negara-negara lain. Menurut kita mobilitas itu adalah hak kita. Jadi hak untuk berpindah itu menjadi hak kita. Tapi Negara itu harusnya melindungi orang-orang yang memobilisasi bukan memberhentikan mobilisasi tersebut. Pilihan itu kita yang mengambil, yang perlu dilihat didesa itu adalah latar belakang kenapa mobilisasi, misalkan karena sudah tidak punya tanah. Tanahnya sudah diambil sama perusahaan, terus kita melarang dia untuk tidak bekerja⁵⁵

Dari pernyataan di atas yang disampaikan oleh Staf Penguatan Organisasi Divisi Perlindungan Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya yang terbentuk atas kurangnya akses-akses kehidupan yang dimiliki buruh migran perempuan serta minimnya perlindungan dari Negara. Untuk itu peranan yang diberikan oleh Lembaga Solidaritas Perempuan ini lahir dari suatu harapan-harapan masyarakat khususnya buruh migran perempuan dan keluarganya yang tidak mendapatkan hak-haknya.

⁵⁵ Lutfatul azizah, "staff dewan pengawasan komunitas", *Wawancara*, Gunung sari 20 Mei 2022.

2. Peran solidaritas perempuan dalam melindungi perempuan migran di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari

Solidaritas Perempuan khususnya divisi perlindungan buruh migran perempuan dan keluarganya adalah lembaga yang bertujuan untuk, *“Terwujudnya perlindungan yang komprehensif terhadap buruh migran perempuan dan keluarganya”*.⁵⁶

Terwujudnya perlindungan yang komprehensif terhadap buruh migran perempuan dan keluarganya sejalan dengan perspektif Solidaritas Perempuan yaitu perspektif feminisme khususnya dalam program perlindungan buruh migran perempuan dan keluarganya.

Perspektif kita kan perspektif feminis ya bagaimana melihat relasi antara laki-laki dan perempuan, dan kerentanan perempuan, karena bagaimanapun kita melihat migrasi ini berwajah perempuan karena kebanyakan buruh migran yang bekerja di luar negeri itu adalah perempuan dan kebanyak dari perempuan yang bekerja di luar negeri itu sebagai PRT. Nah PRT itu kan pekerjaan-pekerjaan domestik yang sampai sekarang itu di anggap informal oleh Negara.⁵⁷

Oleh karena perspektif feminis yang digunakan itu peneliti akan melihat keberperanan Lembaga Solidaritas Perempuan terhadap buruh migran khususnya perempuan, dalam kaca mata masyarakat dan klien Solidaritas Perempuan. Menurut Soejono Soekanto, peran adalah suatu perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, dan dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki suatu kedudukan dalam

⁵⁶ Eli sukaemi, “staff penanganan kasus devisi perlindungan”, *Wawancara*, Gunung sari 19 Mei 2022

⁵⁷ Lutfatul azizah, “staff dewan pengawasan komunitas”, *Wawancara*, Gunung sari 20 Mei 2022.

masyarakat, maka ia pun melaksanakan suatu perannya tersebut dengan memperhatikan hak dan kewajibannya.⁵⁸

Seperti yang diketahui Lembaga Solidaritas Perempuan merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang salah satu fokusnya adalah perlindungan terhadap buruh migran perempuan. Peneliti memilih teori peran ini karena melihat harapan masyarakat terhadap Lembaga Solidaritas Perempuan untuk membantu mendampingi serta melindungi korban buruh migran perempuan.

Dari penjelasan tersebut di atas, terlihat suatu gambaran bahwa yang dimaksud dengan peranan merupakan kewajiban-kewajiban dan keharusan-keharusan yang dilakukan seseorang maupun suatu organisasi atau lembaga karena kedudukannya di dalam status tertentu dalam suatu masyarakat di mana ia berada. Peranan yang dilakukan oleh Lembaga Solidaritas Perempuan suatu kewajiban yang harus dilakukan melihat harus adanya keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat dan timbullah harapan dari buruh migran perempuan dan keluarganya serta masyarakat yang melihat bahwa kurangnya perlindungan kepada buruh migran perempuan di Negara ini.

a. Peran pertama adalah memfasilitasi komunitas sasaran.

Kategori yang pertama dalam peran terkait pemberdayaan yang dipaparkan oleh Jim Ife adalah memfasilitasi komunitas sasaran. Menurut Jim Ife memfasilitasi komunitas sasaran adalah dapat melakukan mediasi dan negosiasi, memberikan dukungan memfasilitasi kelompok,

⁵⁸ Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali, 1988), hlm. 220

memanfaatkan sumber daya dan keterampilan dan mengorganisir. Sedangkan menurut peneliti memfasilitasi komunitas sasaran adalah upaya penyelesaian konflik pada kasus yang dihadapi klien dengan berinteraksi dengan pihak-pihak yang terlibat seperti memberikan dukungan, mencari solusi dan dapat membuat seseorang terampil dalam bermasyarakat.

Pihak Solidaritas Perempuan terhadap buruh migran melakukan fasilitasi komunitas sasaran pada buruh migran perempuan dan keluarganya. Dari temuan lapangan yang peneliti temukan, berikut hasil wawancara dengan JN dan SH, selaku mantan buruh migran perempuan:

Solidaritas Perempuan mendampingi saya dan keluarga ke polres tabes, ke kantor DPTKI, Solidaritas Perempuan mendampingi saya terus dalam menangani kasus yang sedang saya alami bersama suami yang belum balik juga ke Indonesia. Solidaritas Perempuan juga memberikan saya semangat, motivasi agar tidak terlalu merasa takut menghadapi masalah sebegini beratnya.⁵⁹

Berdasarkan pernyataan di atas Solidaritas Perempuan selalu memfasilitasi kliennya dengan mendampingi dalam keadaan apapun dan kemanapun saat proses penanganan kasus berlangsung. Solidaritas Perempuan juga memberikan gambaran prosedur selama penanganan kasus berlangsung terhadap keluarga korban buruh migran perempuan.

Pertama prosedurnya tuh SP kasih gambaran. Pihak SP mau bagaimana ke keluarga, nah saya menyerahkan kuasa ke pihak SP biar menyerahkan urusannya ke pihak SP, jadi keluarga saya merasa dibantu, karena pihak Taiwan memulangkan zenazah harus lengkap semua surat-suratnya. Terus SP nganter saya ke pihak asuransi dianter, di depatemen luar negri dianter, kan saya ga tau tuh cara-caranya bagaimana. Ke PT juga minta surat-surat berkas-

⁵⁹ Julianti, "Mantan Buruh Migran", *Wawancara*, Gunung Sari 21 Mei 2022.

berkas gimana caranya, kan saya gak tau cara-caranya. SP memberikan prosedurnya.⁶⁰

Dari wawancara dengan saudara JN dan SH kita melihat fungsi peran dari Lembaga Solidaritas yang selalu memberi arahan serta prosedur yang harus dilakukan untuk buruh migran perempuan dan keluarga dalam proses penanganan kasus yang dialaminya. Lembaga Solidaritas Perempuan memfasilitasi komunitas-komunitas sasaran salah satunya dalam divisi ini yaitu berfokus pada buruh migran perempuan dan keluarganya. Memfasilitasi di sini sesuai kebutuhan kliennya tersebut dan dalam bentuk-bentuk penguatan kepada kliennya tersebut.

b. Peran kedua adalah membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, mengkonfrontasikan dan latihan.

Peran kedua ini menurut Ife adalah dapat membangkitkan kesadaran masyarakat, dapat menyampaikan informasi dan mengkonfrontasikan serta adanya pelatihan. Sedangkan menurut peneliti Solidaritas Perempuan tidak hanya menangani kasus yang ditanganinya saja tapi juga memotivasi buruh migran perempuan dan keluarganya dalam menghadapi masalahnya dan tidak hanya pada saat permasalahannya berlangsung tetapi Solidaritas Perempuan selalu memonitor setelah permasalahannya selesai.

Utamanya sih motivasi untuk saya ga putus asa, untuk saya bisa semangat lagi, memberikan motivasi yang positif lah agar saya ga down

⁶⁰ Siti Halimah, "Mantan Buruh Migran", *Wawancara*, Gunung Sari 21 Mei 2022.

pulang dari singapur itu. Dan juga memberikan jalan keluar juga dari masalah saya itu.⁶¹

Dengan keberperanan Solidaritas Perempuan dalam memotivasi Buruh migran perempuan dan keluarga dirasa sangat berpengaruh untuk membangkitkan semangat dalam mencari jalan keluar penanganan kasus. Motivasi yang dilakukan ini membuat semangat baru dalam menanggapi masalah buruh migran perempuan ini. Mereka jadi memiliki visi misi yang jelas dan positif untuk kedepannya. Selanjutnya saudara TN yang juga mantan buruh migran ikut dalam berbagi pengalamannya pada saat adanya diskusi kampung diadakan.

Kaka tuh diajakin ikut kaya seminar gitu Kaka si pengen ikut aja, jadi pas Kaka kesana tuh ternyata solidaritas perempuan itu terfokus kesitu jadi Kaka diminta bercerita begini-begitu, itu pertama kalinya kaka ngasih tau ke orang-orang kalau pengalaman disana tuh gak enak.⁶²

Solidaritas Perempuan juga membuat diskusi kampung dengan menjelaskan gender dan semacamnya untuk membangkitkan kesadaran di lingkungan tersebut. Solidaritas Perempuan juga mengadakan *learning cycle* untuk berbagi pengalaman guna melahirkan paralegal-paralegal. Bersama mantan kliennya untuk bersama-sama membantu saudara dan teman yang mengalami permasalahan seperti mereka dan memberi tahu keadaan yang harus dilakukan untuk menangani kasus serupa. “*Tadinya saya malu berbicara sekarang bisa berbicara membela yang benar.*”

⁶¹ Martini, *Wawancara*, Gunung Sari 21 Mei 2022

⁶² Tina, *Wawancara*, Gunung Sari 21 Mei 2022

Dulunya ga tau cara membela perempuan jadinya tahu cara membela perempuan”⁶³.

Dari pernyataan tersebut terlihat sedikit demi sedikit hasilnya, adanya peningkatan kapasitas dari pelatihan yang dilakukan oleh lembaga solidaritas perempuan. Peserta pelatihan-pelatihan yang menjadi peserta pada diskusi kamupung dan traning paralegal juga diberi penyadaran, motivasi, dan informasi seputar permasalahan-permasalahan yang ada disekitar mereka terutama permasalahan seputar prosedur keberangkatan, prosedur penanganan kasus jika bermasalah dan tata cara pelatihan menjadi muruh migran di luar negeri.

c. Peran ketiga adalah peran sebagai wakil masyarakat dalam hal mencari sumber daya, advokasi, memanfaatkan media, membina hubungan masyarakat, mengembangkan jaringan, membagi pengetahuan dan pengalaman.

Peran ketiga menurut ife adalah peran sebagai wakil masyarakat dalam hal mencari sumber daya, advokasi, memanfaatkan media, membina hubungan masyarakat, mengembangkan jaringan, membagi pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan menurut peneliti adalah peran disini sebagai perwakilan lembaga swadaya masyarakat untuk memecahkan kasus contohnya melalui advokasi dan melalui kampanye.

Setelah Itu kita membawa perempuan-perempuan yang sudah diedukasi itu pada ranah advokasi bagaimana pengakuan-pengakuan terhadap perempuan itu yang sebelumnya tidak diakui tapi itu harus diakui dulu, akhirnya barulah kebijakan-kebijakan

⁶³ JN, *Wawancara*, Gunung Sari 21 Mei 2022

yang itu harus berperspektif perempuan yang selama ini dikesampingkan jadi perempuan harus terlibat dalam semua proses pengambilan keputusan termasuk juga pada kebijakannya bukan hanya dilihat sebagai objek kebijakan selama ini perempuan tidak bisa mengintervensi., dalam kebijakan dirumuskan perempuan harus apa, tetapi pada perumusannya perempuan tidak dilibatkan.⁶⁴

Tujuan advokasi pada dasarnya untuk mengubah kebijakan program atau kedudukan dari sebuah pemerintahan, institusi atau organisasi. Tujuan advokasi di Solidaritas Perempuan adalah untuk memberikan pendampingan bagi buruh migran perempuan dan keluarganya berkaitan permasalahan yang dihadapi mereka terutama hukum. Secara umum tujuannya untuk memberikan komitmen dan dukungan dalam upaya penyelesaian permasalahan, maupun berbagai bentuk lainnya sesuai dengan prioritas kasus.

Dari tujuan advokasi yang sudah dijelaskan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan advokasi adalah untuk memberikan pemahaman dan bantuan hukum terhadap buruh migran perempuan dan keluarganya dalam memperjuangkan terpenuhinya hak-hak mereka.

Harapannya konsistensi dan yang paling penting adalah regenerasi, ada orang-orang yang punya keresahan bersama terkait dengan situasi hari ini, khususnya anak-anak muda. Kita juga lagi bangun gerakan anak muda yang mau mendengar isu perempuan isu feminis dan tidak lagi melihat isu feminis mengada ada. Kalo-kalo itu terjadi disekitar kita dan tidak melihat lagi isu feminis itu stigma-stigma misalnya feminis itu ngejang banget padahal sebelum dideklarasikan. Feminis itu kan Cuma nama, tapi perjuangan soal bagaimana perempuan menuntut haknya Indonesia sudah lebih dulu dari pada ideologi feminis itu sendiri efeknya itu sendiri terminology yang ada didunia

⁶⁴ Lutfatul azizah, "staff dewan pengawasan komunitas", *Wawancara*, Gunung sari 20 Mei 2022.

akademis kita masyarakat tuh ga punya nama atas semua perjuangan itu. Tapi karena mengenalnya feminis jadi harapannya feminis tidak dianggap sebagai pengaruh laki-laki dan segala macam karena bermitra bukan siapa mendominasi siapa. Nah SP sangat menentang perempuan yang dominan gak boleh perempuan juga melakukan kekerasan itu juga kita menentang itu tidak hanya laki-laki.⁶⁵

Lembaga Solidaritas Perempuan sebagai wakil masyarakat dalam hal mencari sumber daya, salah satunya mencari regenerasi yaitu anak-anak muda yang memiliki kepedulian yang sama berbasis feminis. Yang mau mendengar isu perempuan tidak lagi melihat isu feminis mengadanya jika terjadi disekitar kita dan tidak melihat lagi isu feminis itu suatu stigma yang mengekang. Jadi sangat penting sekali mencari sumber daya manusia untuk meregenerasi demi berlanjutan kearah yang lebih baik. *“Kita kan punya kerja sama jaringan ya, Baik itu level daerah msapun regional, dan internasional”*.⁶⁶ Mengembangkan jaringan di Solidaritas Perempuan juga berguna dalam proses mengadvokasi kasus yang masuk. Dengan adanya kerja sama jaringan dirasa berguna untuk membantu buruh migran dan keluarganya dalam proses penyelesaian masalah mereka.

⁶⁵ Lutfatul azizah, “staff dewan pengawasan komunitas”, *Wawancara*, Gunung sari 20 Mei 2022.

⁶⁶ Eli sukaemi, “staff penanganan kasus devisa perlindungan”, *Wawancara*, Gunung sari 19 Mei 2022

BAB III

PEMBAHASAN

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dari beberapa teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dalam hal ini peneliti akan menjelaskan lanjut terkait dengan analisis penelitian peran lembaga solidaritas perempuan terhadap perlindungan perempuan

A. Kondisi Perempuan Buruh Migran di desa kekeri kecamatan gunung sari kabupaten Lombok Barat.

Kondisi merupakan suatu keadaan yang dialami oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, ada beberapa kondisi yang dialami, yaitu: ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga kondisi tersebut akan selalu hidup berdampingan dengan manusia.

Menurut Abdulisyani (dalam Ranasari, 2013: 21), kondisi ekonomi merupakan kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktifitas ekonomi, pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan.

Adapun kondisi perempuan buruh Migran di desa Kekerri kecamatan Gunung Sari kabupaten Lombok Barat berdasarkan wawancara kemarin setidaknya ada tiga persoalan yang di hadapi oleh perempuan buruh migran, yaitu: ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama tidak berlakunya izin kerja karena di perbaharui, sehingga status mereka saat ini adalah tidak memiliki dokumen; kedua mereka harus bersembunyi dari raja supaya tidak tertangkap;

ketiga kuranya informasi yang di dapat sehingga perempuan buruh migran banyak yang tidak mendapat gaji.

Pertama, mayoritas perempuan buruh migran saat ini tidak memiliki dokumen, karena berbagai hal, mereka yang awalnya Smemiliki dokumen sekalipun, saat ini dalam keadaan melanggar aturan ijin tinggal dan ijin kerja (*overtstay*) dan otomatis tidak berdokumen (*undocumented*) dan dianggap sebagai pelanggaran atauran kemigrasian. Hal ini di duka karena mayoritas perusahaan dan agen yang telah gagal memperbarui ijin kerja mereka (permit kerja). Menurut keterangan yang diberikan pekerja, penyebab perusahaan maupun agen yang ditnjuk gagal memperbarui ijin kerja mereka adalah karena kantor-kantor imigrasi seringkali tutup.

B. Peran lembga solidaritas perempuan dalam melindungi perempuan migran di desa kekeri kecamatan gunung sari

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti tentang peran solidaritas perempuan terhadap perempuan buruh migran di desa kekeri kecamatan gunung sari antara lain:

1. Solidaritas perempuan melakukan fasilitas komunitas sasaran pada buruh migran perempuan dengan cara mendampingi dalam keadaan apapun dan kemanapun saat proses penanganan kasus berlangsung terhadap keluarga korban buruh migran perempuan
2. Solidaritas perempuan membangkitkan kesadaran masyarakat dan menyampaikan informasi solidaritas perempuan tidak hanay menangani kasus saja tetapi juga memotifasi buruh migran perempuan dalam

menghadapi masalahnya dan tidak hanya pada saat permasalahan berlangsung

3. Peran sebagai wakil masyarakat dalam mencari advokasi, memanfaatkan media dan membina hubungan masyarakat, mengembangkan jaringan membagi pengetahuan dan pengalaman, upaya penyelesaian masalah, maupun berbagai bentuk lainnya sesuai prioritas kasus.⁶⁷

Berdasarkan pemantauan kebijakan dan pengalaman penanganan kasus solidaritas perempuan (SP) menilai bahwa telah terjadi pembiaran negara terhadap perlindungan hak-hak buruh migran perempuan (BMP), situasi tersebut terlihat dengan lemahnya tanggung jawab negara terkait perlindungan buruh migran perempuan secara kompereshif.

Dengan penguatan ini, mereka diharapkan mampu menghadapi kerentanan terhadap proses migrasi yang tidak aman, trafficking serta HIV dan AIDS. Selain itu, dapat membangun konsolidasi diantara komunikasi solidaritas perempuan (SP) dan anggota keluarganya untuk mendesak pemerintah agar memberikan jaminan payung hkum perlindungan hak-hak buruh migran perempuan (BMP) melalui ratifikasi konvensi migran 1990, serta mendorong sistem penempatan dan perlindungan buruh migran perempuan yang lebih melindungi dari proses yang melemahkan memiskinkan mereka. Program ini juga diarahkan pada upaya-upaya mengglang dukungan publik di tingkat lokal, nasional, regional, dan

⁶⁷ Lemabaga solidaritas perempuan (SP)

internasional untuk bersama-sama melindungi buruh migran perempuan dari kerentanan mereka terhadap trafficking, HIV dan AIDS.

Ada 6 permasalahan sekuran-kurangnya trekiat dengan tata kelola dalam implementasi jaminan sosial pekerjaan migran indonesi. Yang pertama belum tercovernya perlindungan bagi PMI yang mengalami kecelakaan kerja dan membutuhkan perawatan di negara penempatan .kemudian masalah kedua terkait manfaat JKK dan JKM yang belum sejalan dengan PP 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP NO 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JJK dan JKM. Padahal sudah jelas dalam PP 82 tahun 2019, menghimpun terkait manfaat program JKK sebelum dan setelah bekerja, perlindungan atas resiko kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Atau perawatan dan pengobatan bagi pekerja migran yang terkena penyakit dilingkungan kerja, pergantian biaya pengangkutan santunan cacat, santunan kematian akibat kecelakaan.permasalahn ketiga, adanya persyaratan dalam pengajuan klaim di luar persyaratan yang sudah diatur dalam permenaker 18 Tahun 2018 tentang Jamsostek PMI. Keempat, belum adanya bantuan bagi anak PMI yang belum memasuki jenjang pendidikan, dan orang tuanya apabila mengalami total atau meninggal dunia . kelima, terbatasnya akses bagi PMI yang akan melakukan perpanjangan kepesertaan dari negara penempatan

dalam pembayaran iuran. Keenam, pengajuan klaim masih bersifat manual sehingga kesulitan dalam mengetahui kemajuan klaimnya.⁶⁸

Pada awal januari 2020 lembaga solidaritas perempuan menangani 9 kasus yang di laporkan oleh keluarga perempuan buruh migran di desa kekeri kecamatan gunung sari yang gagal berangkat ke Malaysia dan terindikasi menjadi korban *trafficking*.



Perpustakaan UIN Mataram

⁶⁸ <http://m.liputan6.com/news/read/4566325/deretan-masalah-pekerja-migran-dan-penyelesaian-dari-manaker> pada tanggal 26 mei 2022 pukul 08: 43 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yang diteliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

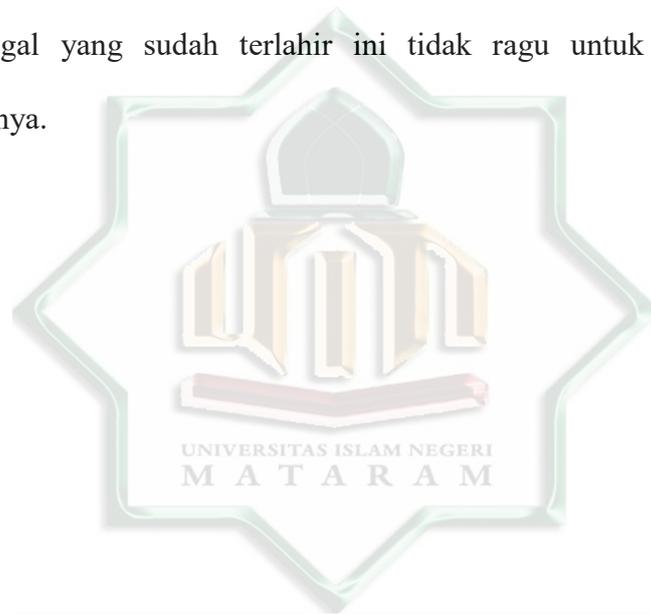
1. Adapun kondisi buruh migran di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, yaitu sebagian besar mengalami kesulitan dalam segi ekonomi, sosial dan budaya, yaitu tidak berlakunya izin kerja karena diperbaharui, mereka harus bersembunyi dari raja supaya tidak tertangkap dan kurangnya informasi yang didapat sehingga perempuan buruh migran banyak yang tidak mendapat gaji.
2. Dan adapun peran lembaga solidaritas perempuan dalam melindungi perempuan migran di desa kekerri kecamatan gunung sari, yaitu mendampingi buruh migran dalam keadaan apapun dan kemanapun saat proses penanganan kasus berlangsung terhadap keluarga korban buruh migran perempuan, memotivasi buruh migran perempuan dalam menghadapi masalahnya dan tidak hanya pada saat permasalahan berlangsung dan memanfaatkan media dan membina hubungan masyarakat, mengembangkan jaringan membagi pengetahuan dan pengalaman.

B. Saran

1. Berdirinya lembaga solidaritas perempuan diharapkan dapat terus mengembangkan dan meningkatkan pelayanan dengan mengadakan sosialisasi yang lebih luas, lagi sehingga lembaga solidaritas perempuan

dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada perempuan buruh migran serta masyarakat sekitar.

2. Untuk menambah kualitas solidaritas perempuan kepada klien perempuan buruh migran. Perempuan tetap berupaya untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan terutama dalam proses perlindungan perempuan buruh migran yang dibrikan agar perempuan buruh migran perempuan dan paralega-paralegal yang sudah terlahir ini tidak ragu untuk untuk melaporkan kasusnya.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- A. Murni Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 338
- Acitiya, "Penjernihan Istilah Lembaga dalam Dualisme Antara Kelembagaan dan Organisasi" (18 Maret, 2013). Hlm. 3.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), 142.
- Cristoporus Dika Adiatma, "Solidaritas Nge-click" (Universitas Sanata Dharma, 30 Mei 2016 8:56 am)
- Hantor Situmorang, *Pemenuhan Hak Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, CV BUDI UTAMA, 2021). Hlm. 1-2
- Hazza Shabira, "Peran Media Komunikasi Solidaritas Perempuan Sumbawa Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Sumbawa", (Jurnal Of Communication Science, 2021), Hlm. 105.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh_Migran.
- <https://kumparan.com/berita-update/solidaritas-pengertian-jenis-dan-contohnya-lengkap-1x40vq5mLmvhttps://www.sosiologi.info/2021/11/teori-solidaritas-sosial-emile-durkheim-mekanik-organik-contohnya.html>
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/perempua>
- Jamaluddin, "Relasi Sosial Minoritas Muslim Di Kalangan Mayoritas Kristen (Studi Kasus Di Dusun Nggeru Kecamatan Donngo Kabupaten Bima)" Skripsi Jurnal Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram Tahun 2020, Hlm. 18
- Maulidiah Kurniawati, "Kehidupan Keagamaan Masyarakat Nelayan di Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo" Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2017". Skripsi Program Studi Perbandingan Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama (UIN-Maliki Press: Sukses Offset Yogyakarta, 2008), hlm. 119.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan)*, Cetakan Ketiga, (Padang: Prenadamedia, 2013), hlm: 384

Narbuko Cholid, Acyadi Abu, “*Metode Penelitian: Memberi bekal teoritis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*”, (Jakarta: Bumi Askara, 2015), hlm. 2

Noeng Muhadjir *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2016), hlm. 245

Salim, Haidir, “*Penelitian Pendidikan (Metode, Pendekatan, Dan Jenis)*”, (Jakarta” Kencana, 2019), hlm. 100

Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*,” (Bandung: Alfabeta CV, 2014), Hlm. 119.

Syarifah Asmar, *Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan Dan Keluarganya*, (skripsi, FIDK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019), hlm. 1-2.

Yulius Purwadi Hermawan, “*Identifikasi Potensi Perempuan Dalam Upaya Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia*”, (Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, 2014), hlm. 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram